

STUDI KOMPARATIF PENCATATAN AKUNTANSI SESUAI SAK ETAP DENGAN PENCATATAN UMKM DI SIDOARJO

Musyafa'ah

Universitas Negeri Surabaya

museyafa@yahoo.com

ABSTRACT

This reseach is aimed to : 1) explain the difference between the accounting records which is used based SAK ETAP and in SMEs ; 2) identify trends in SMEs which organized accounting records in based SAK ETAP. Types of data using primary and secondary data. Financial statement analysis unit is owned SMEs and Cooperatives. Collection methods in this research were interviews and observation. Research conducted it can be concluded that there are differences between the accounting records in based accounting records SAK ETAP with SMEs and Cooperatives. Tendency Cooperative enterprises are more obedient than applying SAK ETAP UD Establishments and CV . But the format of the financial statements of the cooperative is still lacking in accordance with SAK ETAP.

Keywords : SAK ETAP, SMEs, accounting record.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah sendiri adalah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sudah diatur dalam UU no 20 tahun 2008.

Suatu UMKM butuh pengembangan dalam usaha, yaitu pengembangan dari aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, lingkungan dan keuangan. Dari kelima aspek tersebut mempengaruhi prospektif suatu UMKM. Selain itu, suatu UMKM perlu menerapkan informasi akuntansi untuk mendukung kelima aspek tersebut. Tetapi praktek akuntansi pada UMKM di Indonesia masih rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengembangan UMKM (Furqan, 2012).

Pada umumnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi hanya memiliki informasi akuntansi yang masih sederhana, bahkan untuk usaha mikro tidak memperdulikan informasi akuntansi seperti pencatatan operasional atau pencatatan beban-beban yang mempengaruhi harga jual suatu barang produksi. Jika hal ini terjadi pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi maka besar kemungkinan tidak ada perkembangan yang signifikan pada usaha. Sehingga dampak yang terjadi dari tidak adanya informasi akuntansi adalah tidak dapat mengukur kinerja perusahaan, jika usaha akan menjalin mitra dengan lembaga keuangan maka akan mengalami kesulitan.

Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan akuntansi memiliki manfaat dalam mengembangkan UMKM. Di antaranya untuk pihak eksternal adalah kemudahan mengakses peminjaman kredit pada lembaga keuangan, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pihak internal yaitu dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengevaluasi UMKM yang sudah dijalankan selama tahun periode.

Suatu entitas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi. Untuk keperluan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008, bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari empat miliar delapan ratus juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada direktur jenderal pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun bersangkutan.

Sehingga bagi wajib pajak yang penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan. Jika wajib pajak tidak memberitahu tentang penyelenggaraan norma perhitungan penghasilan neto maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Begitu juga dengan sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah membayar denda, jika tidak dipenuhi maka mendapat sanksi pidana.

Menurut Sulistiawan (2006) *Statement of the Accounting Principle Board* No.4, dewan penyusun standar Akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang suatu badan usaha untuk pengambilan keputusan ekonomis. Maksudnya akuntansi dapat diartikan sebagai: (1) kegiatan jasa; (2) akuntansi menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan; (3) akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis.

Akuntansi terproses dari nilai transaksi yang kemudian dilakukan penjurnalan dan *posting* hingga tersusun menjadi laporan keuangan. Sedangkan

laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP tersusun dari laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada UMKM di Sidoarjo terdapat model pencatatan akuntansi yang berbeda-beda. UMKM menyediakan pencatatan akuntansi yang sederhana. Sebagian UMKM hanya memiliki bukti transaksi yang tidak terproses. Hal ini terjadi pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki karyawan sedikit. Sebab dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi dibutuhkan prinsip pengendalian internal dan pemisahan wewenang.

Untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, Dewan Standart Akuntansi Keuangan menerbitkan SAK ETAP yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas Publik signifikan seperti UMKM dan Koperasi. Sebab pada entitas akan menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum untuk pengguna eksternal, misalnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Dalam penelitian ini, Usaha Mikro Kecil Menengah yang diteliti adalah usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki badan hukum UD, CV dan Koperasi. Karena ketiga jenis UMKM dan koperasi ini merupakan jenis usaha yang memiliki kemampuan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sehingga dari ketiga jenis UMKM dan koperasi tersebut peneliti akan membandingkan pencatatan akuntansi yang dimiliki oleh setiap UMKM dan koperasi. Maka penelitian ini berjudul “Studi Komparatif Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP Dengan Pencatatan UMKM di Sidoarjo”.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adakah perbedaan pencatatan akuntansi antara SAK ETAP dengan pencatatan UMKM dan Koperasi ?
- 2) Adakah kecenderungan jenis UMKM dan koperasi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai SAK ETAP ?

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan perbedaan antara pencatatan akuntansi sesuai SAK ETAP dengan pencatatan akuntansi UMKM
2. Mengidentifikasi kecenderungan jenis UMKM yang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai SAK ETAP.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Menurut UU No.20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah diantaranya, untuk usaha mikro yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan paling Rp 300 juta, untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 300 juta, sedangkan untuk usaha menengah memiliki hasil penjualan tahun lebih dari Rp 2.500 juta rupiah.

Industri kecil Indonesia dibedakan menurut klasifikasi BPS dalam tiga kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja termasuk pengusaha yang bekerja yaitu :

1. Industri yang berskala besar dengan jumlah pekerja paling sedikit 50 orang
2. Industri yang berskala sedang dengan jumlah pekerja 20 sampai 49 orang

3. Industri yang berskala kecil dengan jumlah pekerja 5 sampai 19 orang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usaha masyarakat.

Koperasi mengalami perubahan dalam membuat laporan keuangan. Pada Standar Akuntansi Keuangan no 27 menjelaskan tentang akuntansi perkoperasian yang kemudian direvisi pada tahun 1998 dan reformasi tahun 2007. Kemudian terbit SAK ETAP yang telah diterbitkan pada tahun 2009. Sehingga koperasi merupakan salah satu unit usaha yang laporan keuangannya memiliki Standar Keuangan Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Nurdita, 2013).

Komponen laporan keuangan koperasi ditegaskan dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 35 yaitu setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat : 1) neraca; 2) perhitungan hasil usaha; 3) catatan atas laporan keuangan. Karena komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maka terdapat laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP

Siklus akuntansi terdiri dari tahap pencatatan dan tahap pengikhtisaran. Pada tahap pencatatan meliputi : a) pembuatan atau penerimaan bukti transaksi; b) pencatatan dalam jurnal; c) pemindah-bukuan (*posting*) ke buku besar. Sedangkan pada tahap pengikhtisaran meliputi : a) pembuatan neraca saldo; b) pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian; c) penyusunan laporan keuangan; d) pembuatan jurnal penutup; e) pembuatan neraca saldo penutup; f) pembuatan jurnal balik (Soemarso, 2004).

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir (Waluyo, 2010).

Dengan pencatatan akuntansi yang dihasilkan adalah membentuk sebuah laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dengan adanya laporan keuangan untuk membantu hal-hal yang akan dilakukan oleh manajemen atau

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas (Kieso,2002).

Dalam menyusun suatu laporan keuangan, terdapat karakteristik kualitatif pada informasi laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, materilitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Laporan keuangan tersusun dari posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP meliputi :

- a) Neraca atau laporan posisi keuangan yang menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.

Informasi yang tersajikan pada neraca minimal memuat sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha dan piutang lainnya
3. Persediaan
4. Property investasi
5. Asset tetap
6. Asset tidak berwujud
7. Utang usaha dan utang lainnya
8. Asset dan kewajiban pajak
9. Kewajiban diestimasi
10. Ekuitas

- b) Laporan laba-rugi

Entitas menyajikan laporan laba-rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut.

Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi minimal mencakup sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan ekuitas
4. Beban pajak
5. Laba atau rugi neto

c) Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- i) Seluruh perubahan dalam ekuitas
- ii) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik kapasitasnya sebagai pemilik.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu :

- a. Laba atau rugi untuk periode
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan

- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari : a) laba atau rugi; b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c) jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Informasi yang disajikan dalam laba rugi dan saldo laba, untuk laporan laba rugi sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk saldo laba mencakup :

- a. Saldo laba pada awal periode pelaporan
 - b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode
 - c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu
 - d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi
 - e. Saldo laba pada akhir periode pelaporan
- d) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1. Aktivitas operasi misalnya : a) penerimaan kas dari penjualan atas barang dan jasa; b) penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi dan pendapatan lain; c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksud untuk dijual kembali.
2. Aktivitas investasi misalnya : a) pembayaran kas untuk memperoleh asset tetap, asset tidak berwujud dan asset jangka panjang lainnya; b) penerimaan kas dari penjualan asset tetap, asset tidak berwujud, dan asset jangka panjang lainnya; c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*; d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture*; e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
3. Aktivitas pendanaan misalnya : a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menembus saham entitas; c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman wesel, dan pinjaman jangka

pendek atau jangka panjang lainnya; d) pelunasan pinjaman; e) pembayaran kas oleh *lesse* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

- e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus : a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu; b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Peranan Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP Pada UMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar yang ditetapkan oleh ikatan akuntansi Indonesia untuk perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP dibuat agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya SAK ETAP diharapkan laporan yang dimiliki oleh setiap unit usaha memiliki laporan keuangan yang sama dan berguna untuk pihak eksternal perusahaan.

Manfaat penerapan SAK ETAP pada usaha kecil dan menengah adalah untuk mengembangkan usaha dalam upaya meyakinkan publik bahwa usaha yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara dalam mempertanggungjawabkan perusahaan yaitu melakukan penyajian laporan keuangan sesuai standar yang telah ditentukan. Karena dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut Auliyah (2012) pada artikel ilmiah yang berjudul Penerapan Akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo menyimpulkan bahwa pengusaha kampung batik di Sidoarjo dalam kegiatan usahanya. Namun laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena mayoritas pengusaha UKM belum mengetahui adanya SAK ETAP.

Dari artikel Suhairi (2007) yang berjudul Overload Standar Akuntansi Keuangan dan Analisis Teknik Serta Prosedur Akuntansi untuk Pengembangan Penerapan Akuntansi pada UMKM di Indonesia memberikan salah satu kesimpulan yaitu teknik dan proses akuntansi yang digunakan diterapkan UMKM di Indonesia masih banyak terpengaruh dengan sistem tata buku sehingga banyak yang tidak mampu menyiapkan laporan keuangan secara lengkap. Umumnya, UMKM menggunakan buku kas harian yang kemudian dari buku tersebut disusun laporan laba rugi. Sedangkan untuk menyusun laporan keuangan lainnya, ditemukan berbagai kesulitan sehingga banyak yang tidak mampu menyiapkan laporan keuangan.

Sariningtyas, Pestiwi dan DW Tituk (2011) dalam artikel berjudul Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Usaha Kecil dan Menengah memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi UMKM. Sebagian teruji kebenarannya, karena hanya variable pemahaman teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan variable tingkat pendidikan pemilik dan karakteristik laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Nurdita (2013) menyimpulkan dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai bahwa secara garis besar pengurus koperasi yang ada di kota Dumai telah menerapkan akuntansi sederhana dalam pelaporan pertanggungjawaban. Tetapi laporan keuangan yang diselenggarakan masih belum sesuai dengan format SAK ETAP.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif yang membandingkan antara pencatatan akuntansi sesuai SAK ETAP dengan pencatatan UMKM dan Koperasi di Sidoarjo. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan yang dimiliki UMKM dan koperasi di Sidoarjo yang dijadikan sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan literature-literatur yang mendukung. Untuk data sekunder yang dibutuhkan adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM dan Koperasi pada tahun 2012.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa UMKM di Sidoarjo dan observasi pada UMKM dan koperasi yang telah ditetapkan sesuai pertimbangan, yaitu UMKM dan koperasi yang sudah memiliki ijin usaha atau SIUP serta memiliki karyawan minimal lima belas orang. Lokasi UMKM dan koperasi berada di Sidoarjo. Sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*.

Teknik analisis Penelitian ini menggunakan analisis komperatif kualitatif yang meliputi :

1. Mengidentifikasi pencatatan akuntansi yang dimiliki UMKM dan koperasi
2. Mengidentifikasi pencatatan akuntansi UMKM yang sesuai SAK ETAP
3. Mengkomparasi antara 1 dan 2 dengan tujuan untuk menilai pencatatan yang telah diterapkan pada UMKM
4. Menginterpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian sebanyak enam UMKM dan Koperasi yang merupakan hasil pertimbangan berdasarkan kriteria UMKM. Pada UMKM dan koperasi peneliti mempertimbangkan UMKM yang sudah memiliki kriteria sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UMKM, dengan syarat UMKM sudah memiliki badan hukum. Objek penelitian ini adalah UMKM dan koperasi di bidang manufaktur.

Table 1. UMKM dan Koperasi di Sidoarjo

No.	Nama UMKM dan Koperasi	Komoditas	Pendapatan per tahun	Jenis pencatatan akuntansi yang dimiliki	Keterangan
1	UD Harva	Sepatu	1.272.000.000,-	Catatan pembelian bahan baku	Tidak sesuai SAK ETAP
2	Koperasi Intako	Tas dan Koper	10.460.731.495,-	1. Lap Laba-Rugi 2. Neraca 3. Lap pembagian SHU 4. Anggaran tahun depan 5. Catatan pembelian ATK	Tidak sesuai SAK ETAP
3	CV Dwi Jaya	Sofa	1.200.000.000,-	Catatan pembayaran upah karyawan	Tidak sesuai SAK ETAP
4	CV Jasa Serial	Aluminium dan Kaca	2.156.000.000,-	Catatan pembelian bahan baku dan pembayaran upah karyawan	Tidak sesuai SAK ETAP
5	UD Lancar Jaya	Mebel	2.235.000.000,-	Catatan pembayaran upah karyawan	Tidak sesuai SAK ETAP

6	Koperasi Yala Bina Usaha	Sepatu dan sandal	13.354.321.450,-	1. Lap laba-rugi 2. Neraca 3. Laporan pembagian SHU	Tidak sesuai SAK ETAP
---	--------------------------------	----------------------	------------------	---	--------------------------

Sumber diolah penulis.

Berdasarkan tabel, pendapatan per tahun dari setiap unit usaha sudah menunjukkan nominal di atas tiga ratus juta rupiah per tahun. Hal ini merupakan kriteria bahwa usaha sudah termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pencatatan akuntansi dari enam UMKM dan Koperasi yang diselenggarakan masih sederhana. Sesuai peraturan menteri koperasi dan UMKM yang mewajibkan kepada semua Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi untuk menyelenggarakan laporan keuangan. Karena tujuan dari laporan keuangan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak internal ataupun eksternal.

Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Soemarso (2004), bahwa siklus akuntansi terdiri dari dua tahap yaitu pencatatan dan pengikhtisanaan. Tahap pencatatan meliputi : a) pembuatan atau penerimaan bukti transaksi; b) pencatatan dalam jurnal; c) pemindah-bukuan (*posting*) ke buku besar. Dari data UMKM dan koperasi di Sidoarjo dapat dilihat bahwa UMKM masih memiliki pencatatan akuntansi dalam tahap pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Hal ini ditunjukkan oleh UD Harva, CV Dwi Jaya, CV Serial Jasa, dan UD Lancar Jaya. Usaha ini hanya memiliki nilai transaksi yang berasal dari bukti transaksi, misalnya catatan pembelian bahan baku dan catatan pembayaran upah karyawan.

Pada tahap pengikhtisanaan yang meliputi: a) pembuatan neraca saldo; b) pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian; c) penyusunan laporan keuangan;

d) pembuatan jurnal penutup; e) pembuatan neraca saldo penutup; f) pembuatan jurnal balik. Tahap ini sudah diselenggarakan oleh koperasi Intako dan koperasi Yala Bina di Sidoarjo. Namun laporan keuangan yang dimiliki adalah laporan neraca dan laporan laba rugi.

Dewan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik berfungsi untuk menyelaraskan pemakaian laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Namun berdasarkan data yang didapat, tidak semua Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Perbedaan pencatatan akuntansi yang sesuai SAK ETAP dengan Akuntansi UMKM dan Koperasi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2 Identifikasi Pencatatan Akuntansi

No	Perbedaan	Akuntansi sesuai SAK ETAP	Akuntansi UMKM
1.	Komponen laporan keuangan	Laporan keuangan meliputi : a. Laporan laba rugi b. Laporan neraca c. Perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Laporan kebijakan akuntansi	1. Pembelian bahan baku 2. Pembayaran upah tenaga kerja 3. Faktur dari pemasok
2.	Tujuan pembuatan laporan keuangan	Agar dapat dipahami oleh pihak eksternal dan internal	Hanya dapat dipahami oleh pihak internal

Sumber diolah penulis.

Dari tabel identifikasi di atas maka terlihat kecenderungan jenis UMKM dan koperasi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi SAK ETAP. Pencatatan akuntansi yang sesuai SAK ETAP pada UMKM dan koperasi di Sidoarjo masih belum diterapkan secara penuh.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbadan hukum koperasi sudah mampu menyelenggarakan informasi akuntansi pada tahap pengikhtisaran, hal ini terbukti dengan memiliki laporan keuangan yang berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan untuk usaha yang berbadan hukum UD dan CV masih belum mampu menerapkan akuntansi hingga tahap pengikhtisaran. UD dan CV hanya mampu menyelenggarakan pada tahap pencatatan, yaitu terbukti bahwa UD dan CV hanya memiliki pembuatan dan penerimaan bukti transaksi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta hasil dari analisis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan pencatatan akuntansi yang sesuai SAK ETAP dengan pencatatan UMKM dan Koperasi terletak pada komponen laporan keuangan, tujuan dari pembuatan laporan keuangan, dan jenis badan hukum yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi.
2. Terdapat kecenderungan jenis UMKM dan koperasi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang sesuai SAK ETAP. Pencatatan akuntansi yang sesuai SAK ETAP hanya dapat diterapkan oleh usaha yang berbadan hukum koperasi, tetapi koperasi belum secara penuh menerapkan SAK ETAP.

Sehingga dari simpulan yang didapat, UMKM dan koperasi masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Maka saran yang

dapat disampaikan untuk penelitian mendatang adalah memperbanyak sampel penelitian, karena dalam penelitian ini hanya membatasi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dibidang manufaktur. Sedangkan saran untuk UMKM dan Koperasi di Sidoarjo adalah perlu dilakukan pendampingan dalam usaha pengembangan UMKM dan koperasi di Sidoarjo melalui pemanfaatan fungsi *incubator*, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Univesity Press.
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo*. Surabaya: PERBANAS.
- Furqan, Andi Chairil. 2012. *Problematika Praktik Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Serta Keterkaitannya Terhadap Akses Kredit*. (Online) balitbangda.sulteng.go.id diakses 5 Mei 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jati, Ahmad Waluyo, Suprpti, Eny, dan Wicaksono, Satria Budi. 2011. Kajian atas Standar Pelaporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat: Komparasi Antara PSAK no 31, SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, (online), jilid 1, No. 2, (diakses 25 Februari 2013).
- Kieso, Weygandt, Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. edisi kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Nurdita, J S Raflesia. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi yang Ada di Kota Dumai*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Universitas Riau.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,. Nomor 04/per/M. KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Sariningtyas, Pratiwi dan Tituk Diah W. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Keperilakuan*, (online), jilid1,No.1 (eprints.upnjatim.ac.id.)diakses 5 Mei 2013.

Soemarso, S.R . 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Suhairi dan Wahdini (2006), *Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*, Makalah yang disampaikan pada SNAIX-Padang.

Sulistiawan, Dedhy dan Feliana, Yie Ke. 2006. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Edisi pertama. Malang: Bayumedia Publishing

Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.